

# ASKAR PERANG SABIL DALAM REVOLUSI FISIK DI YOGYAKARTA TAHUN 1945-1949

## *SABIL WAR TROOP IN PHYSICAL REVOLUTION IN YOGYAKARTA, 1945-1949*

**Iwan Dwi Aprianto, Andrian Eka Yulianto**

Prodi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta

Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman

Pos-el: iwandwiaprianto24@gmail.com

Diterima: 26 Juli; Direvisi: 6 September ; Disetujui: 29 November 2019

### **ABSTRACT**

*The struggle to maintain the Indonesian independence took place in various regions, including in Yogyakarta. Muhammadiyah as an Islamic organization helped to defend Indonesian independence through the struggle of the Muslim clerics. The clerics of Muhammadiyah formed the Sabil War Troop (Askar Perang Sabil/APS) and the Muslim Headquarter of Sabil War Troop (Markas Ulama Askar Perang Sabil/MUAPS) in order to maintain Indonesian independence. During Military Aggression I, Muhammadiyah deployed APS for the first time to the battle front in Mranggen and Srandol. During Military Aggression II, Muhammadiyah worked closely with TNI to defend Indonesian independence in Yogyakarta. This research uses qualitative analysis techniques, namely analysis based on the causal relationship of historical phenomena in the particular of time and place. The results show that the peak of Muhammadiyah clerics participation in the physical revolution was when they helped TNI in the General Offensive of 1 March in 1949 by preventing the Dutch troops enter to Yogyakarta.*

**Keywords:** *Sabil War Troop, Muhammadiyah, physical revolution, Yogyakarta, independence.*

### **ABSTRAK**

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia terjadi di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan para ulama. Ulama Muhammadiyah membentuk Askar Perang Sabil (APS) dan Markas Ulama Askar Perang Sabil (MUAPS) dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada Agresi Militer I, Muhammadiyah menerjunkan pasukan APS untuk pertama kalinya ke *front* pertempuran di daerah Mranggen dan Srandol. Pada Agresi Militer II, Muhammadiyah bekerja sama dengan pasukan TNI untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada hubungan sebab-akibat dari fenomena historis pada cakupan waktu dan tempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa puncak dari keikutsertaan ulama Muhammadiyah dalam revolusi fisik adalah ketika membantu TNI pada Serangan Umum 1 Maret 1949 dengan tugas menghambat pasukan Belanda memasuki Yogyakarta.

**Kata kunci:** Askar Perang Sabil, Muhammadiyah, Revolusi Fisik, Yogyakarta, kemerdekaan.

### **PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia memerlukan waktu lebih dari empat tahun untuk menyelesaikan pertikaian mengenai kedaulatan atas negaranya dengan Belanda. Pemerintah Indonesia menempuh dua jalur perjuangan untuk mengatasi pertikaian tersebut, yaitu jalur

diplomasi dan jalur militer, tetapi pihak Belanda selalu melakukan aksi sepihak ketika diadakan perundingan (Hisbaron, dkk., 2002:52). Belanda mengadakan dua kali serbuan besar-besaran dan terang-terangan yang melanggar kesepakatan, yaitu pada 21 Juli 1947--4 Agustus 1947 dan 19 Desember 1948--20 Desember 1948.

Mereka menyebut tindakannya itu dengan aksi polisionil yang pertama dan kedua, sedangkan Indonesia menyebutnya dengan Agresi Militer Belanda Pertama dan Agresi Militer Belanda Kedua.

Berbagai kalangan lantas melakukan persiapan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, termasuk masyarakat Yogyakarta. Yogyakarta yang dikenal sebagai kota perjuangan – sehubungan dengan aktivitas juang dan peranan seluruh rakyat Yogyakarta – turut serta merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya pada periode Perang Kemerdekaan (Nurhajarini, dkk., 2012:118-119). Rakyat di kota ini memiliki jiwa kemerdekaan yang kuat untuk melawan penguasa kolonial.

Sebagai salah satu organisasi keagamaan dan perjuangan, Muhammadiyah juga aktif ikut serta mengambil bagian dalam membela dan mempertahankan negara yang baru didirikan itu. Bagi Muhammadiyah, upaya untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia digerakkan oleh rasa kebangsaan dan keyakinan agama – perjuangan umat Islam dan perjuangan bangsa Indonesia adalah satu (Nasri, 2012:47-62). Usaha awal yang dilakukan oleh Muhammadiyah tampak dari perjuangan para ulamanya yang membentuk dasar negara Indonesia dalam sidang yang dilaksanakan oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Agresi militer yang dilakukan oleh Belanda akhirnya memberikan kesadaran bagi para ulama Muhammadiyah untuk membentuk suatu badan yang bersifat militer. Mereka lantas memprakarsai berdirinya MUAPS (Markas Ulama Askar Perang Sabil) sebagai wadah bagi pemuda-pemuda Islam mantan laskar Hizbullah dan Sabilillah serta mengorganisasi mereka ke dalam APS (Askar Perang Sabil) (Suratmin, 1996/1997: 20-21). Kata “askar” mempunyai persamaan makna dengan laskar yang sejak awal terbentuknya memang telah ditujukan untuk melakukan perlawanan terhadap apa pun yang

membahayakan keutuhan (Negara Republik Indonesia). APS bukan hanya sekadar kumpulan orang-orang yang siap berperang di medan pertempuran, melainkan sebuah kelaskaran yang terorganisir dengan baik.

Menurut Iskandar (2000:36), keterlibatan elit-elit Islam dalam perlawanan terhadap kekuatan Barat mulai tampak sejak gerakan-gerakan rakyat muncul secara sporadis hampir sepanjang abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20. Meskipun demikian, masih banyak sekali kisah yang belum terungkap mengenai revolusi di tingkat lokal, khususnya tentang keterlibatan para tokoh-tokoh dan ulama-ulama Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1945-1949.

Penelitian ini menguraikan secara ringkas peran dan kontribusi beberapa ulama yang berasal dari organisasi Muhammadiyah dalam Revolusi Fisik 1945-1949. Berkat kontribusi dan semangat yang ditanamkan oleh para ulama tersebut, pemuda-pemuda Islam di berbagai desa di Yogyakarta mencatatkan diri sebagai anggota APS. Pembahasan mengenai peran para ulama Muhammadiyah dalam Revolusi Fisik ini menarik untuk dikaji lebih dalam. Hal ini disebabkan karena ulama dan militer Islam berpengaruh sangat besar untuk memimpin perlawanan rakyat yang tergabung dalam wadah-wadah perjuangan yang bernafaskan *jihad fi sabilillah*. Melalui penelitian ini, rekonstruksi penulisan sejarah militer Islam diharapkan agar tidak hilang begitu saja untuk memperkaya khazanah sejarah Indonesia.

Terkait pustaka, Syaifullah (1997) dalam bukunya yang berjudul *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi* menyebutkan bahwa APS terbentuk akibat keprihatinan para ulama, khususnya Muhammadiyah yang tergabung dalam Masyumi terhadap kondisi negara yang semakin kacau. Hal tersebut memicu para ulama untuk mendirikan badan perjuangan semi militer APS untuk membantu tugas TNI di medan pertempuran. Organisasi ini sengaja dibentuk dan bertindak sebagai kekuatan militer. MUAPS sendiri memiliki

peranan penting dalam memobilisasi APS agar berhasil mempertahankan kemerdekaan.

Nur Aini Setyawati (1988) dalam karya skripsinya berjudul *Askar Perang Sabil: Studi Sosio-Religius dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta* memaparkan bahwa APS juga memiliki struktur organisasi dan tujuan yang sama dengan TNI, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan berjuang bersama TNI. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibentuklah MUAPS yang merupakan wadah bagi para ulama yang tergabung dalam APS. Karya ilmiah ini menjadi rujukan utama peneliti untuk menyorot peranan APS pada masa perang kemerdekaan di Yogyakarta.

Tulisan Suratmin (1996/1997) berjudul *Askar Perang Sabil Sebagai Kekuatan Sosio-Religius dalam Masa Revolusi Fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945-1949* turut mengupas peranan para ulama MUAPS dalam memobilisasi APS adalah melalui pementapan ideologi umat muslim dalam menghadapi penjajah, baik kepada masyarakat yang telah tergabung dalam pasukan APS maupun masyarakat umum. Setelah MUAPS terbentuk, para anggota APS segera menyusun kekuatan dengan melakukan pelatihan fisik dan militer di Alun-Alun Yogyakarta ataupun di depan kompleks Masjid Agung Yogyakarta.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan beberapa permasalahan, yaitu situasi Kota Yogyakarta pada awal proklamasi kemerdekaan Indonesia, latar belakang keikutsertaan para ulama yang mayoritas berasal dari organisasi Muhammadiyah membentuk MUAPS dan APS, serta bentuk keterlibatan APS dalam membantu TNI pada masa Perang Kemerdekaan di Yogyakarta.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik internal dan eksternal, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik atau

pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu menentukan topik yang akan dibahas, yaitu peran Muhammadiyah dalam Revolusi Fisik. Pengumpulan data berupa studi kepustakaan dilakukan di BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya) Yogyakarta, Perpustakaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Pimpinan Pusat Aisyiyah Yogyakarta, Perpustakaan Masjid Agung Yogyakarta, dan Perpustakaan Graha Tama Pustaka.

Tahap selanjutnya adalah kritik internal dan eksternal untuk melihat keaslian dan reliabilitas sumber yang didapatkan. Kritik eksternal yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan melihat latar belakang dari penulis, kertas yang digunakan, jenis huruf, bahasa, ejaan, dan penerbit dari sumber buku. Kritik internal dilakukan dengan melihat isi dari buku tersebut, apakah isinya relevan dengan fakta sejarah dan sesuai dengan topik yang akan dibahas.

Setelah melakukan kritik internal dan kritik eksternal, tahap selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi dilakukan berdasarkan fakta dan juga data yang diperoleh sehingga tidak hanya sekadar imajinasi semata. Untuk itulah peneliti mencantumkan sumber data yang digunakan. Pada tahap interpretasi sumber-sumber primer yang telah didapatkan dibandingkan dengan sumber-sumber lain, baik sekunder maupun primer. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan pemaknaan. Pada tahap ini peneliti berupaya untuk mengaitkan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya sehingga diperoleh gambaran peristiwa secara utuh dan kronologis serta saling berkaitan. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penulisan sejarah. Penulisan sejarah disusun secara kronologis. Historiografi juga merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah yang bertujuan untuk menciptakan keutuhan rangkaian peristiwa sejarah yang sesungguhnya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada hubungan sebab-akibat dari fenomena

historis pada cakupan waktu dan tempat. Dari analisa tersebut dihasilkan tulisan deskriptif-analitis. Sejarah analitis merupakan sejarah yang berpusat pada pokok permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut lantas diuraikan secara sistematis. Dengan titik berat pada permasalahan inilah, sejarah analitis membutuhkan bantuan ilmu-ilmu sosial dalam kajiannya.

## PEMBAHASAN

### 1. Situasi Yogyakarta Pada Awal Proklamasi Kemerdekaan

Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia untuk mengumandangkan proklamasi kemerdekaan. Pidato proklamasi kemerdekaan lantas dikumandangkan oleh Ir. Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta Pusat (sekarang Jalan Proklamasi, Gedung Perintis Kemerdekaan) pada pukul 10.00 WIB (Marwati dan Notosusanto, 2010:149).

Berita mengenai proklamasi kemerdekaan ini sampai ke Yogyakarta melalui Kantor Berita Domei Cabang Yogyakarta pada pukul 12.00 WIB, meskipun berita tersebut belum diketahui di semua daerah pada waktu yang bersamaan. Hal ini disebabkan karena sulitnya komunikasi dan adanya penyegelan radio yang dilakukan oleh Jepang (Marwati dan Notosusanto, 2010:165). Untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, berita proklamasi cepat diketahui oleh umum karena para pemuda membuat pamflet dan menyebarkannya, sedangkan di Yogyakarta berita ini awalnya hanya membingungkan sebagian rakyat karena pemerintah Jepang melalui *Gunseikan Bu* berusaha untuk merahasiakannya (Nurhajarini, dkk., 2012:58).



Gambar 1. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII.

Sumber: *media-kitlv.nl*.

Kabar mengenai berita proklamasi yang telah tersebar di masyarakat ternyata sampai kepada dua penguasa yang ada di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono IX kemudian memanggil Sri Paduka Pakualam VIII dan K.R.T. Honggowongso (staf senior di kepatihan). Pembicaraan itu menghasilkan kata “sepakat” untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proklamasi kemerdekaan. K.R.T. Honggowongso selanjutnya diperintahkan untuk membuat telegram kepada Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta serta kepada dr. Radjiman Wedyodiningrat yang pokoknya berisi ucapan selamat atas diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia dan terpilihnya kedua proklamator menjadi presiden dan wakil presiden (Tashadi, dkk., 2000:10).

Untuk lebih mengkonkritkan sikap kedua pimpinan daerah Yogyakarta tersebut dalam menyambut dan mengisi proklamasi kemerdekaan, pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII mengeluarkan amanat yang menyebutkan bahwa Kesultanan Yogyakarta dan Pakualam adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia (monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia). Pernyataan tersebut merupakan pernyataan politik yang mengandung nilai historis karena memperlihatkan sikap kedua penguasa tersebut dalam menerima pembaruan.

Berikut bunyi amanat tersebut:

Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan, bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Oleh karena itu berhubungan dengan keadaan dewasa ini, segala urusan dalam negeri di Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. Bahwa hubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat Republik Indonesia bersifat langsung, dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini. (Amanat terpisah ini kemudian diikuti oleh amanat bersama yang dikeluarkan pada 30 Oktober 1945) (Tashadi, dkk., 2000:10-11).

Pada 6 September 1945, Mr. Sartono dan Mr. A.A. Maramis lantas datang ke Yogyakarta sebagai utusan dari pemerintah pusat untuk menyampaikan piagam penetapan mengenai kedudukan Yogyakarta dalam lingkungan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno (Suratmin dan Daliso, 2012:75-76). Selanjutnya, pada 13 Oktober 1945 pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh R.P. Soeroso menyatakan bahwa Kota Yogyakarta sangat menentukan untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan perebutan kekuasaan (Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1983:22). Hal inilah yang menyebabkan dibentuknya KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) Yogyakarta.

KNID Yogyakarta pada mulanya berkantor di *Hooko Kai* (Badan Kebaktian Rakyat), yaitu di Jalan K.H. Ahmad Dahlan (sekarang digunakan oleh Kanwil Departemen Penerangan Yogyakarta). Sesuai dengan usaha yang telah digariskan oleh KNI Pusat,

badan ini bertugas untuk menyalurkan dan memperjuangkan segala kehendak rakyat. Badan inilah yang kemudian menjadi kemudi segala gerakan untuk melancarkan jalannya revolusi dan menjadi badan setaraf DPR (Dewan Perwakilan) (Tashadi, dkk., 1991:71).

Sebagai reaksi terhadap proklamasi kemerdekaan, masyarakat di Kota Yogyakarta mulai melaksanakan perebutan kekuasaan dengan melakukan penurunan bendera Hinomaru di Cokan Kantai (sekarang Gedung Agung) pada 21 September 1945 (Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1983:11). Sebelum peristiwa itu terjadi, sebenarnya sudah ada delegasi Indonesia yang diwakili oleh Jalaludin Nasution (Sekretaris Promotor Pemuda Nasional) yang menghadap *Kooti Zimu Kyuku Cokan* (Gubernur Jepang) untuk meminta agar bendera Hinomaru diturunkan dan digantikan dengan Merah Putih. Permintaan tersebut sebenarnya dikabulkan, tetapi hanya sesaat karena bendera Merah Putih diturunkan lagi oleh tentara Jepang. Hal inilah yang menyulut amarah masyarakat dan polisi istimewa. Ribuan massa yang membawa berbagai jenis senjata dengan didukung oleh polisi istimewa kemudian bergerak ke *Cokan Kantai*.

Sesudah bendera Merah Putih berkibar di atas Gedung *Cokan Kantai*, ribuan rakyat Yogyakarta bergerak melakukan pawai di sepanjang Jalan Malioboro. Arak-arakan dipimpin oleh satuan polisi istimewa dengan senjata lengkap. Arak-arakan tersebut berpapasan dengan satuan *Kenpeitei* yang bermarkas di Pingit, tetapi ketika itu tidak terjadi kontak senjata. Pada tanggal yang sama, Kesatuan Polisi Istimewa Yogyakarta di Asrama Polisi Pathuk yang dipimpin oleh R.P. Soedarsono mengadakan ikrar dan ketetapan hati untuk hanya melaksanakan perintah dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pucuk pimpinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Puncak dari pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang adalah terjadinya Pertempuran Kotabaru. Usaha pelucutan

senjata ini sebenarnya sudah dilakukan secara damai melalui perundingan yang dilaksanakan pada 6 Oktober 1945 di rumah Butaico Kotabaru (Gedung Dana Pensiun yang sekarang berada di sebelah barat bangunan SMA N 3 Yogyakarta) (Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1983:11). Pihak Indonesia dalam perundingan tersebut diwakili oleh R. Mohammad Saleh (Ketua KNID), R.P. Soedarsono, Sunyoto, dan Bardosono, sedangkan pihak Jepang diwakili oleh Mayor Otsuka, Kempetai Cho Sasaki, Kapten Ito, dan Kiabuco. Setelah berlangsung selama ± 8 jam, perundingan yang dimulai pada pukul 19.00 WIB tersebut akhirnya mengalami jalan buntu. Gagalnya perundingan inilah yang menyebabkan pertempuran tak dapat dihindarkan lagi. Rakyat dan pemuda yang telah berkumpul di depan gedung dan digerakkan oleh KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah), BPU (Barisan Penjagaan Umum), BKR (Badan Keamanan Rakyat), dan PI (Polisi Istimewa) akhirnya memulai penyerangan pada 7 Oktober 1945 pukul 04.00 WIB.

## 2. Ulama Muhammadiyah dalam Pembentukan Askar Perang Sabil

Sebagai pemuka agama Islam yang memiliki otoritas, para ulama biasanya dijadikan sebagai contoh anutan yang baik dalam lingkungan masyarakatnya. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat menempatkan ulama sebagai penasihat atau pemimpin pergerakan karena dekat dan merakyat (Darban, 1995:1). Ulama sendiri diartikan sebagai orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Secara harfiah, ulama juga disebut sebagai orang muslim yang menguasai ilmu agama Islam, orang muslim yang memahami syariat Islam secara menyeluruh sebagaimana terangkum dalam Alquran dan Sunah, serta menjadi teladan umat Islam dalam memahami dan mengamalkannya.

Selain ikut terlibat langsung dalam pertempuran, para ulama juga berjuang dengan memberikan bekal doa, petunjuk, dan

nasihat kepada para pejuang. Hal tersebut membuat para pejuang mampu memantapkan tekad untuk melaksanakan perjuangan dalam medan pertempuran. Para ulama dianggap dapat menggerakkan masyarakat untuk ikut serta melawan imperialisme Belanda maupun gangguan keamanan lain.

Muhammadiyah merupakan gerakan organisasi Islam dan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang bersumber dari Alquran dan Sunah (Amirrachman, dkk., 2015:13). Sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah merupakan gerakan terstruktur, selalu mengembangkan aktivitas organisasinya, memberikan ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, kehidupan sosial, dan pendidikan modern yang sangat diperlukan bagi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia yang sejalan dengan ajaran Islam.

Perjuangan dari para ulama-ulama Muhammadiyah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tampak melalui tempat ibadah yang digunakan untuk memberikan ajaran-ajaran Islam dan pegangan hidup yang berkaitan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, serta membentuk kader pejuang untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Selain itu, ulama mempunyai andil dalam perjuangan, baik dengan memimpin langsung dalam pertempuran maupun dengan doa dan nasihatnya. Tokoh dan ulama Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo juga ikut andil dalam menyumbang tenaga dan pikirannya untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia, salah satu di antaranya melalui gagasan dan perilaku politik tentang negara Islam. Peran ulama Muhammadiyah tersebut diawali dengan keikutsertaannya dalam BPUPKI dan PPKI yang bertugas untuk menyusun UUD (Undang-Undang Dasar). Hasilnya dapat dilihat dari Sila Pertama Ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan buah pemikiran dari Ki Bagus Hadikusumo (Suhatno, 1982:32).

Pada 21 Juli 1947--4 Agustus 1947, Belanda kembali berusaha menguasai Indonesia dengan melancarkan serangan ke beberapa

wilayah di Indonesia yang dikenal dengan Agresi Militer I. Hal ini membuat keprihatinan di kalangan ulama yang berada di Yogyakarta. Selanjutnya, para ulama Muhammadiyah melakukan *iktikaf* di Masjid Taqwa Suronatan pada Ramadan 1947 yang menghasilkan penetapan pembentukan organisasi APS dan MUAPS. APS merupakan organisasi gabungan dari bekas laskar Hizbullah dan Sabilillah. Laskar ini diharapkan mampu menjawab segala tindakan Belanda kepada Indonesia serta mampu membantu TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia (Rahman, 1983:10).

Gagasan dibentuknya APS dan MUAPS itu disampaikan dalam musyawarah para ulama-ulama Muhammadiyah di Yogyakarta yang dihadiri oleh K.H.R. Hadjid, K.H. Juraimi, K.H. Mahfudz Siradj, K.H. Bagus Hadikusumo, K.H. Abdul Aziz, K.H. Djohar, K.H. Amin, K.H. Daim, K.H. Ahmad Bawawi, Ahmad Badawi, Bakri Syahid, M. Sarbini, Abdullah Mabur, dan lain-lainnya (Suharno, 1982:121).

Susunan pengurus pusat APS sebagai berikut:

Penasihat	: Ki Bagus Hadikusumo
Imam	: K.H Mahfudz Siradj
Ketua	: K.H.R. Hadjid
Wakil Ketua	: K.H. Ahmad Badawi
Bendahara	: K.H. Abdul Aziz dan H. Hasyim
Komandan	: M. Sarbini
Wakil Komandan	: K.H. Juraimi
Penerangan	: Siradj Dahlan
Perlengkapan	: Abdul Djawad
Persenjataan	: M. Bakri Sudja'
Logistik	: Bakri Syahid
Administrasi	: Daim (Suharno, 1982:121)

Susunan organisasi ini dilaporkan kepada Menteri Pertahanan yang waktu itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk memperoleh persetujuan (LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1993:1). Pada susunan tersebut ditetapkan pula tiga orang utusan, yaitu K.H. Mahfudz Siradj, K.H. Ahmad Badawi, dan Ki Bagus Hadikusumo

untuk menghadap Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Keraton Yogyakarta (Majelis Pustaka Muhammadiyah, 1989:5). Sri Sultan Hamengku Buwono IX berkenan dan merestui dibentuknya APS yang tertuang dalam Serat Kekacangan menggunakan bahasa Jawa.

Terjemahan Surat Kekacangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

...sudah menerima menghadap Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Mahfudz Siradj, dan K.H. Ahmad Badawi sebagai wakil para ulama di Yogyakarta, yang menyampaikan permohonan para uama di Yogyakarta setelah melaksanakan *iktikaf* memohon kepada Allah SWT di Masjid Taqwa Kampung Suronatan Yogyakarta pada malam hari tanggal 17 bulan puasa tahun 1879 Jawa atau tanggal 23 bulan Juli tahun 1947...

(*Serat Kekantjangan Dalem Ngarsa Sampejan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Ngajogjakarta Dumateng Asjekar Perang Sabilillah*).

Sri Sultan Hamengku Buwono IX memerintahkan para utusan ulama tersebut untuk menghadap Panglima Besar Jenderal Sudirman agar memperoleh izin. Oleh karena itu, ketiga utusan yang didampingi Muhammad Sarbini menghadap Panglima Besar Jenderal Sudirman di Bintaran. Panglima Besar Jenderal Sudirman sendiri menyetujui gagasan para ulama dalam pembentukan MUAPS dan APS, bahkan beliau bersedia memberikan bantuan perlengkapan untuk latihan dan tenaga pelatih yang dipimpin oleh Mayor Fakhudin (Syaifulloh, 1997:131).

Selain menghadap Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Panglima Besar Jenderal Sudirman, para ulama lainnya yang didampingi K.H. Hadjid menghadap para tokoh masyarakat untuk mengadakan hubungan dengan pemerintah sipil dan militer di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu menghubungi bupati dan komandan militer setempat (Suratmin, 1996/1997:25). Adanya persetujuan dari menteri pertahanan, panglima besar, dan gubernur militer RI tentang pembentukan APS

dan MUAPS membuat pasukan bersenjata APS secara resmi berdiri pada 23 Juli 1947 atau 17 Ramadan 1367 H. di Yogyakarta (wawancara dengan Suratmin, 3 Mei 2016). MT. Arifin (1990: 211) mengemukakan bahwa APS merupakan sebuah organisasi kelaskaran yang terbentuk atas prakarsa para ulama Yogyakarta yang sebagian besar berasal dari kalangan Muhammadiyah sehingga APS bisa dikatakan sebagai organisasi kelaskaran bentukan Muhammadiyah.

### 3. Keterlibatan Ulama Muhammadiyah dalam Perang Kemerdekaan di Yogyakarta

Pada 15 Maret 1947 pemerintah RI menandatangani Perjanjian Linggarjati di Istana Gambir Jakarta (Lapian dan Drouglever, 1992:4), tetapi pihak Belanda secara sengaja melanggar perjanjian tersebut dengan mengadakan serangan di Bogor, Mojokerto, dan berbagai tempat lainnya yang membuat suasana semakin memanas (Kansil dan Julianto, 1972: 54). Selanjutnya, pada 27 Mei 1947, sebelum terbentuknya TNI, Belanda yang diwakili oleh Van Mook melakukan ultimatum kepada Indonesia. Ultimatum tersebut berisi tentang pemerintahan bersama, uang bersama, impor-ekspor bersama, dan devisa bersama (Dinas TNI AD, 1972:134).

Merasa kurang mendapat tanggapan yang positif dari Indonesia, pada 21 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi militer ke Indonesia pada malam hari. Serangan tentara Belanda terfokus pada tiga tempat, yaitu Sumatra Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatra Timur sasarannya adalah daerah perkebunan tebu dan pabrik gula (Hutagalung, 2010:280).

Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan saat itu juga tak luput dari sasaran agresi militer Belanda. Serangan di Yogyakarta dimulai pada 21 Juli 1947 sekitar pukul 07.00 dengan menyerang Lapangan Terbang Maguwo melalui udara. Sekitar empat buah pesawat bom terbang mengitari ibukota Yogyakarta yang kemudian selang beberapa menit Belanda mulai melakukan aksinya dengan menjatuhkan bom

dan menembaki TNI yang berada di Lapangan Maguwo. Pukul 15.00 Belanda menambah jumlah pesawat mereka dan kembali melakukan penyerangan ke daerah Lapangan Maguwo. Belanda berdalih bahwa penyerangan itu hanya sekadar tindakan keamanan dan ketertiban (Kansil dan Julianto, 1972:54).

Melihat situasi tersebut, MUAPS mengirimkan pasukan bersenjata APS ke front pertempuran. Pengiriman pertama dilakukan ke daerah Semarang, yaitu Mranggen dan Srandol. Markas APS yang pada waktu itu berada di Tegalayang Pandak juga mengirimkan satu pasukan yang dipimpin oleh K.H. Juraimi dengan didampingi K.H. Hadjid sebagai imam. Sementara itu, APS cabang Sleman juga mengirimkan bantuan satu kompi dengan dipimpin oleh Badri dan didampingi K.H. Abdurrahman sebagai imam. Keduanya berhasil bergabung untuk melawan Belanda di daerah Mranggen Utara dan Mranggen Selatan (wawancara dengan Darmaji Basuki Rahmat, 8 Januari 2017).

Pada 31 Juli 1947 diputuskan bahwa anggota APS bersenjata ditempatkan di perbatasan Kebumen, yaitu di daerah Grabag (Setyawati, 1988:11). Penempatan ini berdasarkan perintah dari Jenderal Sudirman melalui surat perintah dari Jenderal Urip Sumoharjo yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI. Perintah ini ditindaklanjuti oleh MUAPS dengan mengirimkan satu batalyon yang dilengkapi 120 pucuk senjata, yang dipimpin oleh Sarbini dan K.H. Djuraimi sebagai wakil komanda dan diikuti oleh K.H. Mahfudz Siradj dan K.H.R. Hadjid sebagai imam (Anis, dkk., 1998: 25).

Pasukan ini bertemu dengan Komandan TNI Mayor Yani di daerah Pingit. Pasukan APS dan Komandan Yani bekerjasama mengadakan pertahanan di Pegunungan Ngrancak Ambarawa ke timur sampai Desa Tirto. Mereka melakukan pencegahan dan penjagaan di sepanjang jalan antara Yogyakarta, Salatiga, Magelang, dan Kebumen (Setyawati, 1988:69). Pasca diterimanya Resolusi PBB No. 27 tanggal 1 Agustus 1947 tentang gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia, MUAPS pusat



mengambil tindakan secara tegas mengakhiri tugas pasukan APS di Kebumen, tetapi pasukan APS bertahan di daerah ini hingga awal tahun 1948.

Pada 6 Agustus 1948, Dr. Willem Drees menjadi Perdana Menteri Kabinet Koalisi Bersama Partai Katolik. Dia menggantikan Dr. L.J.M. Beel yang kemudian diangkat menjadi *Hooge Vertegenwoordiger van de Kroon* (Wakil Tinggi Mahkota) Belanda di Indonesia. Beel menggantikan posisi Van Mook sebagai wakil gubernur jenderal. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 18 Desember 1948 pukul 23.30 dengan perantara sepucuk surat, pemerintah Belanda memberitahu Komisi Tiga Negara tentang dibatalkannya gencatan senjata dan Perjanjian Renville dengan pihak Indonesia. Kabar tersebut juga disampaikan kepada bangsa Indonesia (Muljana, 2008:201).

Pada 19 Desember 1948 pagi hari, pasukan Belanda secara mendadak menyerang Lapangan Udara Maguwo melalui pasukan udaranya. Di pihak lain, para ulama melakukan perintah dari Panglima Sudirman untuk ke luar kota dan bergabung dengan TNI, tetapi sebelum itu mereka mengadakan pembagian tugas di antara para anggotanya, yaitu mereka yang harus tetap tinggal di kota dan yang diperbolehkan meninggalkan kota.



Gambar 2. 19 Desember 1948 merupakan serangan pengecut pasukan Belanda untuk merebut Kota Yogyakarta.

Sumber: *media-kitlv.nl*.

Para anggota badan perjuangan MUAPS yang mendapatkan tugas untuk tetap tinggal di

kota antara lain Mato Jumeno, K.H. Mahfudz Siradj, K.H. Badawi, K.H. Djuroini, dan lain-lain. Adapun pasukan bersenjata APS yang diperbolehkan meninggalkan kota keluar harus melalui markasnya yang telah dipindahkan dari Kauman ke Notoprajan (wawancara dengan Darmaji Basuki Rahmat, 8 Januari 2017). Pasukan TNI bersama dengan APS bekerja sama dalam menghadang masuknya tentara Belanda ke ibukota Yogyakarta hingga batas daerah Kabupaten Bantul.

Kontak fisik antara pasukan APS dengan tentara Belanda tidak dapat dihindarkan, akibatnya lima orang pasukan APS gugur dalam pertempuran tersebut. Selanjutnya pasukan APS bertahan di Karangakajen, dari sana pasukan APS terus melakukan gerilya selama seminggu untuk menyerang pasukan Belanda di dalam kota. Belanda ternyata mengetahui lokasi keberadaan markas pasukan APS di Karangakajen, sehingga dilakukanlah penyerangan yang mengakibatkan empat orang pasukan APS gugur di medan pertempuran (Setyawati, 1988:79-81).

Di Kabupaten Bantul, Belanda melancarkan aksinya dengan menyerang dan mengepung Pabrik Gula Padokan. Serangan itu menyebabkan lima anggota APS gugur. Perlawanan APS di Sleman dilakukan dengan penyerangan pos Belanda di Jembatan Bantar dari tiga arah, yaitu barat, timur, dan selatan. Pertempuran di Jembatan Bantar ini mengakibatkan 11 anggota APS gugur (Setyawati, 1988:80-81).

Pasukan APS juga ditugaskan di Kulon Progo. Di daerah Kulon Progo sendiri banyak gangguan dari garong dan perampok yang merajalela saat berlangsungnya Revolusi Fisik sehingga atas permintaan MUAPS cabang Kulonprogo pasukan bersenjata APS dari Yogyakarta di bawah pimpinan Harun Al-Rosyid dikirim untuk mengamankan wilayah tersebut (Gerilya Wehrkreise III, tt:47).

Kekuatan ulama yang tergabung dalam badan perjuangan MUAPS di Gunung Kidul dipusatkan di Kecamatan Panggang dengan M. Hani bertindak sebagai imam, dibantu

oleh Harun Al-Rosyid sebagai komandan dan Mawardi sebagai wakil komandan pertempuran (Setyawati, 1988:125). Selanjutnya mereka membagi kekuatan ke setiap kecamatan (kecuali Tepus dan Rongkop) untuk dilatih bergerilya dalam menghadapi tentara Belanda.

Dalam rangka menyerang Kota Yogyakarta pada 1 Maret 1949, pasukan APS diatur sedemikian rupa untuk mengadakan persiapan dari arah selatan benteng dan tersebar ke dalam kota di bawah pimpinan Komandan TNI Kompi Komaruddin. Sebelumnya, pasukan bersenjata APS di daerah Bantul mengadakan konsolidasi di sekitar Sewon untuk menghambat masuknya pasukan Belanda yang datang dari Barongan, sedangkan pasukan bersenjata APS di daerah Sleman barat mengadakan rintangan di sepanjang Jalan Sudagaran dengan sasaran Stasiun Tugu dan Hotel Tugu di bawah pimpinan Arnis dan dikoordinasi oleh SWK 103. Pasukan bersenjata APS di bawah pimpinan Masyudi dan Badri juga mengadakan pertahanan di sekitar Jembatan Krasak untuk menghadang pasukan Belanda dari utara (Setyawati, 1988:125).

Pasukan bersenjata APS juga dipersiapkan untuk mengadakan rintangan di sepanjang Jalan Yogyakarta-Magelang. Selain itu, pasukan bersenjata APS yang berada di tiap sudut kota, baik yang berada di Kauman, Notoprajan, Suronatan, Lempuyangan, Mergangsan, Pakualaman, Karangajen, dan tempat-tempat lainnya untuk siap menerima perintah dari TNI mengadakan serangan terhadap Belanda (Setyawati, 1988:101).

Setelah Belanda meninggalkan Yogyakarta, peranan MUAPS dan APS pasca Serangan Umum 1 Maret 1949 di bidang sosial keagamaan tetap berlangsung seperti semula, tetapi tak sedikit pula para anggota MUAPS dan APS yang melanjutkan kariernya dengan masuk anggota TNI. Pada perkembangan selanjutnya, APS dan MUAPS sebagai wadah perjuangannya bubar dengan sendirinya tanpa ada upacara secara resmi. Mantan anggota APS diakui sebagai veteran oleh pemerintah,

sedangkan para anggota TNI kembali melanjutkan tugas kemiliterannya.

## **PENUTUP**

APS terbentuk dari keprihatinan para ulama Muhammadiyah yang melihat bahwa kondisi bangsa Indonesia kian mengkhawatirkan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Mereka membentuk Laskar Angkatan Perang Sabil sebagai organisasi semimiliter Islam pada 23 Juli 1947 di Masjid Taqwa yang berada di Kampung Suronatan, Yogyakarta. Dalam perkembangannya, nama tersebut diubah menjadi APS, sedangkan wadah perjuangannya diberi nama MUAPS.

Tujuan utama didirikannya APS adalah membantu TNI dalam melawan musuh serta melandaskan perjuangan sesuai dengan ajaran Islam yang menyeru untuk berjuang di jalan Allah SWT. Adapun organisasi yang dibentuk oleh para ulama Muhammadiyah ini terdiri atas kelompok bekas laskar Hizbullah dan Sabilillah, serta kelompok pemuda kampung Muslim yang menjadikan peranannya sebagai badan perjuangan yang menitikberatkan perjuangan di bidang militer dan bernaftaskan Islam.

Keterlibatan para ulama Muhammadiyah yang tergabung dalam APS untuk membantu TNI mempertahankan kemerdekaan terlihat dalam berbagai pertempuran di berbagai daerah di Yogyakarta. Keberhasilan perjuangan pasukan APS beserta TNI dan badan perjuangan lainnya merupakan hasil kerja sama semua pihak yang dapat tidak terlepas dari semangat *jihad fi sabilillah*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirrachman, Alpha dkk. 2015. *Islam Berkemajuan Untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Anis, Yunus, dkk. 1998. *Kenalilah Pemimpin Anda*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah Majelis Pustaka.

- Arifin, M.T. 1990. *Muhammadiyah Potret yang Berubah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Buku Panduan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta.
- Darban, Ahmad Adaby. 1995. Ulama Jawa Bagian dari Warisan Budaya Islam di Indonesia: Dinamika Perkembangan dan Perjuangannya. *Makalah Seminar Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta*.
- Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 1983. *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta Jilid I*. Yogyakarta: Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dinas TNI AD. 1972. *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI AD*. Bandung: Fa. Mahyuma.
- Gerilya Wehrkreise III*. tt. Yogyakarta: Percetakan Keluarga.
- Hadikusumo, Djarnawi. 1979. *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perjoengan, dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo*, Yogyakarta: Persatuan.
- Hutagalung, Batara R. 2010. *Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.
- Iskandar, Mohammad. 2000. *Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Kansil, C.S.T. dan Juiliano. 1972. *Sedjarah Perdjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Lapian, A.B. dan P.J. Drouglever. 1992. *Menelusuri Jalur Linggarjati Diplomasi dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Grafiti.
- LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 1993. *Selintas Perjalanan Askar Perang Sabil (APS) dan Markas Ulama Askar Perang Sabil (MUAPS)*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Muljana, Slamet. 2008. *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan Jilid II*. Yogyakarta: LKIS.
- Muryantoro, Hisbaron, dkk. 2002. *Kilas Balik Sejarah Perjuangan Bangsa (1945-1950)*. Yogyakarta: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Nasri, Imron. 2012. *Muhammadiyah di Hadapan Saksi Sejarah*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Nasution, Abdul Haris. 1979. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9: Agresi Militer Belanda II*. Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa Bandung.
- Nurhajarini, Dwi Ratna, dkk. 2012 *Yogyakarta: Dari Hutan Beringin ke Ibukota Daerah Istimewa*. Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pustaka. 1989. *Perkembangan Muhammadiyah*. Yogyakarta Majelis Pustaka Muhammadiyah.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notosusanto. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahman, Abdur. 1983. *Laskar Angkatan Perang Sabil 1948-1949*. Yogyakarta: Lembaga Research dan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga.
- Rahmat, Darmaji Basuki (65 tahun). 2019. Mantan Prajurit Askar Perang Sabil. (Wawancara: Yogyakarta, 8 Januari 2019). *Serat Kekantjingan Dalem Ngarsa Sampejan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Ngajogjakarta Dumateng Asjika Perang Sabilillah*
- Setyawati, Nur Aini. 1988. Askar Perang Sabil: Studi Sosio-Religius dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah FS-UGM.
- Suhatno. 1982. *Ki Bagus Hadikusuma: Hasil Karya dan Pengabdiannya*. Jakarta: Proyek IDSN Ditjarahnitra-Depdikbud.

- Suratmin (70 tahun). 2019. *Peneliti Askar Perang Sabil*. (Wawancara: Yogyakarta, 3 Mei 2019).
- Suratmin dan Daliso Rudianto. 2012. *Sri Sultan Hamengku Buwono IX: Pejuang dan Pelestari Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Kaiswaran.
- Suratmin. 1996/1997. *Askar Perang Sabil Sebagai Kekuatan Sosio-Religius dalam Masa Revolusi Fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945-1949*. Yogyakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Syaifullah. 1997. *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Grafiti.
- Tashadi, dkk. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Tashadi, dkk. 2000. *Keterlibatan Ulama di DIY Pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
- Yayasan 19 Desember 1948. 1949. *Dokumen Ripress dalam Perang Rakyat Semesta 1948-1949*. Jakarta: Balai Pustaka.